

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa adanya realokasi tujuan diberikannya DID selama masa pandemi COVID-19 mengakibatkan penurunan efektivitas DID terhadap Kinerja Daerah. Namun sekalipun pengaruh DID menurun ketika masa pandemi, pengaruh yang dimiliki DID terhadap Kinerja Daerah masih positif. Artinya DID memang efektif untuk mempengaruhi Kinerja Daerah baik saat sebelum maupun masa pandemi COVID-19. Dengan adanya perubahan pemanfaatan DID dalam PMK no.87 tahun 2020, efektivitas DID terhadap Kinerja Daerah mengalami penurunan. DID yang diberikan oleh pemerintah pusat diperkenankan digunakan untuk penanggulangan COVID-19 sehingga menjadi tidak terfokus kepada 4 tujuan awal yang tercantum dalam PMK no 170 tahun 2022.

Selain itu, penelitian ini menemukan pengaruh DID memiliki tingkat signifikansi yang lebih rendah dibandingkan dengan *regional endowment factor* dengan melihat koefisien variansi bahwa DID memiliki proporsi yang lebih kecil. Tingkat signifikansi yang lebih rendah sangat dimungkinkan disebabkan oleh proporsi DID yang lebih kecil dibandingkan *regional endowment factor*. Jika proporsi DID ditingkatkan, maka akan ada kemungkinan meningkatnya efektivitas DID. Dilihat dari besarnya variansi DID dibandingkan dengan *regional endowment factors*, variansi DID lebih kecil. Maka DID lebih cocok digunakan sebagai kebijakan untuk memeratakan Kinerja Daerah di Indonesia dibandingkan dengan transfer ke daerah yang terkait dengan *regional endowment factors*. Indonesia sebagai negara dengan wilayah geografis yang luas dan beragam menerapkan desentralisasi fiskal dan menggunakan instrumen transfer daerah sebagai cara untuk menyalurkan dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Oates (1972) mengenai desentralisasi fiskal, DID merupakan salah satu dana yang terdapat dalam transfer daerah.

DID memiliki pengaruh yang cukup efektif untuk mendorong Kinerja Daerah, namun jika ingin dijadikan kebijakan utama terdapat kendala karena nilai DID yang tidak terlalu besar. Selain itu pemberian DID yang tidak merata ini dipengaruhi oleh faktor bahwa DID merupakan insentif yang diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja baik. Pengaruh yang diberikan DID terhadap Kinerja Daerah akan berpengaruh secara positif hanya ketika

disertai dengan *regional endowment factors*. Tanpa penyertaan *regional endowment factors* yang memadai, pemberian DID untuk provinsi tidak memiliki pengaruh yang positif terhadap Kinerja Daerah.

5.2 Saran

Merujuk kepada hasil penelitian yang menyatakan bahwa penyebab menurunnya pengaruh DID untuk Kinerja Daerah disebabkan karena adanya realokasi penggunaan data untuk kondisi pandemi. Pemerintah perlu lebih memperhatikan kegunaan dari setiap dana yang diberikan agar tidak terjadi penurunan dampak dari dana yang diberikan. Fenomena seperti realokasi pemanfaatan terjadi tidak hanya pada DID, bahkan dana transfer daerah lainnya seperti DAU, DBH, dan Dana Desa pun diperkenankan untuk penanggulangan COVID-19 saat masa pandemi. Saran yang dapat diberikan peneliti adalah pemerintah mempertimbangkan pengadaan dana transfer daerah tambahan dengan tujuan khusus untuk penanggulangan kemungkinan *shock* seperti pandemi agar tidak menurunkan pengaruh terhadap tujuan utama pemberian dana lainnya. Saran yang dapat diberikan kepada penulis selanjutnya mengenai topik terkait adalah dengan penggunaan data yang lebih banyak dari 34 provinsi di Indonesia dalam kurun waktu 2018-2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrafarm. (2021). *Data COVID-19 2020-2021*. Retrieved September 30, 2023, from m.andrafarm.com: https://m.andrafarm.com/_andra.php?_i=daftar-co19-provinsi&urut=2&asc=00100000000&no1=2&corke=712
- Guan, J. C., & Yam, R. C. (2014). Effects of government financial incentives on firms' innovation performance in China: Evidences from Beijing in the 1990s. *Research Policy*, 44(1), 273-282. doi:<http://dx.doi.org/10.1016/j.respol.2014.09.001>
- Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2021). *Kebijakan DID 2021*. Retrieved Mei 11, 2023, from <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/01/Kebijakan-Dana-Insentif-Daerah-2021.pdf>
- Kompas. (2022, 9 21). *Dana Insentif Daerah Didorong untuk Pengendalian Inflasi*. Retrieved Mei 11, 2023, from kompas.id: <https://www.kppod.org/berita/view?id=1142#:~:text=Astera%20menjelaskan%2C%20DID%20merupakan%20bentuk>
- Luo, W., & Liu, Y. (2022). Research on the Impact of Fiscal Decentralization on Governance Performance of Air Pollution - Empirical Evidence of 30 Provinces from China. *Sustainability*, 14(18), 1-21. doi:<https://doi.org/10.3390/su141811313>
- Mankiw, N. G. (2015). *Principles of Economics*. Stamford USA: Cengage Learning. doi:978-1-285-16587-5
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020*. Retrieved Mei 9, 2023, from Website Kemenkeu: <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=16814>
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 170/PMK.07.2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua Pada Tahun 2022*. Retrieved Mei 9, 2023, from jdih.kemenkeu.go.id: <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://jdih.kemenkeu.go.i>

d/download/e0c4026f-cace-415a-92a3-
26b1a67e8925/170~PMK.07~2022.pdf&ved=2ahUKEwjnhACAnnez-
AhW9xjgGHWuIAPAQFnoECBoQBg&usg=AOvVaw3c4QTAAQZrlGbXtObTq_4M

Nurhidayat, D. (2021). *Menkeu: DAU, DBH dan Dana Desa Boleh Dipakai untuk COVID-19*. Retrieved November 28, 2023, from Media Indonesia: <https://mediaindonesia.com/ekonomi/413407/menkeu-dau-dbh-dan-dana-desa-boleh-dipakai-untuk-covid-19>

Oates, W. E. (1972). *Fiscal Federalism*. Northampton: Edward Elgar Publisher, 65-105

Oates, W. E. (1999). An Essay on Fiscal Federalism. *Journal of Economic Literature*, 37(3), 1120-1149. doi:10.2307/2564874

Pambudi, A. S., Manalu, G., & Deni. (2022, 12 29). Evaluasi Pemanfaatan Dana Insentif Daerah Berbasis Penghargaan Pembangunan Daerah Pada Provinsi Jawa Tengah, Bengkulu dan Jawa Timur. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 5(2), 1-11. doi:10.33701/jkp.v5i2.2679

Pebriyanto, F., & Setiawan, K. (2020). *Kemenkeu Jelaskan Tujuan Dana Insentif Daerah Ditambah Rp 5 T*. Retrieved April 2023, from Tempo website: <https://bisnis.tempo.co/read/1367982/kemenkeu-jelaskan-tujuan-dana-insentif-daerah-ditambah-rp-5-t>

Presiden Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan*. Retrieved Juni 20, 2023, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49713/pp-no-55-tahun-2005>

Presiden Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Retrieved Desember 12, 2023, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019>

Ramadhani, P. I. (2020, 3 18). *Pemerintah Utamakan Belanja Anggaran buat Penanganan Corona Covid-19*. Retrieved Mei 11, 2023, from liputan6: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4205601/pemerintah-utamakan-belanja-anggaran-buat-penanganan-corona-covid-19>

Rastika, I. (2021, 1 29). *Mendagri Usul Dana Insentif Diberikan ke Daerah yang Berprestasi dalam Vaksinasi Covid-19*. Retrieved Mei 11, 2023, from kompas website: <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/29/19424031/mendagri-usul-dana-insentif-diberikan-ke-daerah-yang-berprestasi-dalam>

Tupani, D. (2020, 7 1). *Pemerintah Terbitkan Perpres 72/2020 untuk Penanganan Covid-19*. Retrieved Juni 12, 2023, from Media Indonesia website: <https://mediaindonesia.com/ekonomi/324482/pemerintah-terbitkan-perpres-722020-untuk-penanganan-covid-19>

World Bank. (2013, Juni 6). *Decentralization*. Retrieved November 28, 2023, from The World Bank website: <https://www.worldbank.org/en/topic/communitydrivendevelopment/brief/Decentralization>